

**Kemiskinan dan Ketimpangan Melalui Prevelensi
Ketidakcukupan Konsumsi Masyarakat di Indonesia**

Riza Nabila¹, Irranda Putra Syahna², Khopifah Indah Daulay³, Sari Wulandari⁴

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

⁴Fakultas Ekonomi Universitas Muslim Nusantara Al-washliyah

rizanabila9@gmail.com, sariwulandari@umnaw.ac.id

ABSTRACT

Poverty is a person's inability to meet the needs of everyday life. Poverty is a serious problem that must be addressed immediately. One of the causes of poverty is because there are differences between income and expenditure levels that occur in various regions, this is what is known as inequality. The prevalence of insufficient public consumption is a condition in which people are unable to meet their needs properly and healthily. This is closely related to poverty. Because, if there is no poverty, it is possible that people's consumption will be fulfilled. This study uses a qualitative method in the literature approach. This research aims to examine more deeply related to poverty and inequality in Indonesia through the prevalence of insufficient consumption of the Indonesian people. The results of this study show that the poverty and inequality rates in Indonesia since March 2022 and the insufficient public consumption will also decrease. the insufficient consumption of the Indonesian people in terms of food consumption has increased from 2019 around 7.63, 2020 around 8.43 until 2021 it reaches 8.49.

Keywords: *poverty, inequality, inadequacy society*

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya sehari-hari. Kemiskinan menjadi salah satu masalah serius yang harus segera di atasi. Salah satu penyebab kemiskinan dikareknakan terdapat perbedaan antara tingkat pendapatan dengan pengeluaran yang terjadi di berbagai wilayah, hal ini lah yang disebut sebagai ketimpangan. Prevelensi ketidakcukupan konsumsi masyarakat adalah suatu kondisi dimana tidak mampunya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak dan sehat. Hal ini erat kaitanya pada kemiskinan. Sebab, jika tidak adanya kemiskinan kemungkinan konsumsi masyarakat akan terpenuhi. penelitian ini menggunakan metode kualitatif pada pendekatan kepustakaan. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam terkait kemiskinan dan ketimpangan yang ada di Indonesia melalui prevelensi ketidakcukupan konsumsi masyarakat Indoneisa. Hasil penelitian ini menunjukkan angka kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia sejak Maret 2022 dan ketidakcukupan konsumsi masyarakat pun akan berkurang. ketidakcukupan konsumsi masyarakat Indonesia dari segi konsumsi pangan semakin meningkat dari tahun 2019 berkisar 7,63, tahun 2020 berkisar 8,43 sampai tahun 2021 mencapai 8,49.

Kata kunci : kemiskinan, ketimpangan, ketidakcukupan masyarakat

PENDAHULUAN

Indonesia yang termasuk sebagai negara berkembang pastinya memiliki tujuan, visi, dan misi untuk meningkatkan pembangunan negara demi mencapai kesejahteraan bangsa. Berbagai tujuan tersebut datang dari adanya permasalahan, salah satu permasalahan yang masih terus dihadapi oleh negara ini yaitu

kemiskinan. Kemiskinan sudah menjadi perhatian bagi seluruh negara di dunia terutama negara berkembang, maka dari itu pengentasan kemiskinan termasuk dalam rencana aksi global yang telah disepakati oleh pimpinan negara di dunia.

Kemiskinan adalah kondisi ketika seseorang tidak dapat mempertahankan skala hidup yang cukup tinggi untuk memberikan efisiensi fisik dan mental untuk memungkinkan dia dan keluarganya menjalankan fungsi sebagaimana mestinya sesuai dengan standar masyarakat baik karena pendapatan yang tidak sesuai. Sedangkan Budi Winarno berpendapat bahwasannya ketimpangan adalah sebab dari kegagalan pembaharuan di era modern untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani pada masyarakat sekitar.

Kemiskinan lahir sebagai dampak dari proses pembangunan yang tidak mencapai target kepada sebuah perbaikan sosial. Setiap pembahasan tentang pembangunan, maka pembahasan kemiskinan mendapatkan tempat yang cukup penting. Masalah kemiskinan di Indonesia telah menjadi topik pembicaraan dan fokus kebijakan sejak pemerintahan kolonial Belanda dengan meluncurkan suatu program anti kemiskinan lewat kebijakan yang dikenal dengan "politik etis".

Secara konseptual, kemiskinan dirumuskan sebagai suatu kondisi hidup yang serba kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Secara operasional kriteria kemiskinan itu ditetapkan dengan tolok ukur garis kemiskinan. Penduduk miskin adalah golongan masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan, sedangkan target pembangunan biasanya dirumuskan sebagai upaya, mengentaskan golongan masyarakat miskin agar mereka bisa berada di atas garis kemiskinan tersebut.

Ketimpangan merupakan sebuah masalah yang menyelimuti sebagian besar wilayah di Indonesia. Bisa dikatakan bahwa ketimpangan ini tidak akan pernah terselesaikan, karena semakin maju sebuah daerah maka terdapat ketimpangan yang sangat jelas antara kelompok tingkat pendapatan tinggi dengan kelompok tingkat pendapatan rendah, antar kelompok disebuah lapangan kerja yang bagus seperti pekantoran dengan kelompok dilapangan kerja yang biasa saja seperti buruh, dan pendapatan perkapita antar daerah yang sangat maju dengan daerah yang terbelakang.

Indikator prevelensi ketidakcukupan konsumsi masyarakat dimanfaatkan untuk memonitor tren atau perubahan pola ketidakcukupan konsumsi energi dari makanan, dalam suatu populasi, secara berkala dari waktu ke waktu.

Indikator ini dapat menggambarkan perubahan dalam ketersediaan makanan dan kemampuan rumah tangga untuk mengakses makanan, pada tingkat sosial ekonomi yang berbeda, serta pada tingkat nasional dan provinsi/kabupaten. Indikator ini digunakan untuk mengukur target menghilangkan kelaparan secara global karena dianggap memungkinkan untuk mengestimasi kondisi kekurangan pangan yang parah dalam jumlah populasi yang besar.

TINJUAN LITERATUR

Kemiskinan

Bappenas mendefinisikan kemiskinan sebagai keadaan dimana individu atau sekelompok laki-laki dan perempuan tidak mampu mencukupi hak-hak dasarnya untuk mengembangkan dan mempertahankan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar tersebut meliputi: (1) Pemenuhan kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, air bersih, pertanahan, pekerjaan, perumahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, (2) Rasa aman dari ancaman atau perlakuan tindak kekerasan, (3) Akses untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik. (Bappenas, 2021). Secara khusus, kemiskinan di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor. Hasil penelitian menyebutkan bahwa kemiskinan di Indonesia disebabkan oleh keterbatasan sumber daya alam, keterbatasan modal, terbatasnya lapangan kerja, pendidikan yang rendah, malas bekerja, dan beban keluarga (Itang, 2015).

Jika melihat tingkat kemiskinan di Indonesia, pada semester pertama tahun 2021, tingkat kemiskinan di Indonesia sebesar 10,14% dari jumlah penduduk atau sekitar 27.542.770 (BPS, 2021). Beberapa program pemerintah yang dicanangkan untuk menanggulangi kemiskinan di Indonesia belum cukup handal untuk menjadi solusi permasalahan tersebut terutama di dalam pemerintahan daerah atau yang ada dibawahnya. Salah satu daerah yang masih terus menghadapi kemiskinan adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan data BPS, selama lima tahun berturut-turut tingkat kemiskinan di provinsi ini terus berada diatas angka kemiskinan secara nasional dan selalu diatas 10%. Data terbaru menyebutkan bahwa penduduk miskin di provinsi ini mencapai 12,80% atau sekitar 506.450 jiwa. (BPS, 2021).

Ketimpangan

Ketimpangan adalah masalah awal yang terjadi di suatu Negara. Menurut Wilkinson dan Picket (2009), kesenjangan mengalami beberapa permasalahan sosial maupun kesehatan, yaitu mengalami peningkatan baik itu kekerasan, kejahatan, stres, gangguan jiwa, bahkan kecanduan pada minuman yang beralkohol maupun narkoba, terjadinya kehamilan pada usia dini, meningkatnya angka anak yang tidak bersekolah serta melanggar norma-norma yang berlaku (tidak adanya kerukunan antara seseorang yang satu dengan yang lainnya dalam bermasyarakat yang tujuannya untuk saling bekerjasama demi kemaslahatan bersama). Sedangkan menurut Bank Dunia (2016), meningkatnya suatu ketimpangan mengakibatkan terjadinya suatu permasalahan sosial dalam berbagai macam masalah. Apabila masyarakat sekitar mengetahui adanya kekurangan penghasilan maupun modal, bahwa kapasitas permasalahan sosial ini sering bermunculan bahkan tidak adanya kerukunan yang sangat mungkin terjadi sehingga dapat menimbulkan konflik.

Menurut Berita Resmi Statistik (2019), pergantian kualitas masyarakat dalam suatu ketimpangan sangat mempengaruhi kesempatan dalam berbagai penyisihan antar masyarakat. Maka penyisihan terhadap masyarakat yang perekonomiannya tingkat bawah akan lebih cepat dibandingkan dengan masyarakat yang perekonomiannya lumayan maka ketimpangan penyisihannya akan semakin

stabil. Menurut Bank Dunia (2016), agar mengerti apa yang mau dimajukan dalam suatu ketimpangan di Indonesia dan mengapa ketimpangan semakin menaik, kita juga harus lebih paham sumber daya apa saja yang harus dipunya dalam setiap anggota keluarga yang berbeda dan dengan cara apa orang tersebut memakainya dalam menghasilkan penghasilan. Adapun penyebab lain yang juga berpengaruh mengenai ketimpangan adalah dengan cara apa penghasilan tersebut dihabiskan yaitu memiliki empat pendukung utama ketimpangan di Indonesia yang memiliki pengaruh besar pada generasi masa kini maupun masa akan datang. Satu, ketimpangan kesempatan berarti tidak semua orang bisa melakukan pengembangan keahliannya agar bisa dapat kerja yang bergaji tinggi. Dua, dengan meningkatnya kebutuhan untuk memperoleh suatu keahlian yang memadai dalam ekonomi modern, jika orang tersebut lulus maka orang tersebut akan mendapat suatu imbalan yang sangat berharga. Meskipun orang tersebut sama sekali tidak mempunyai keahlian yang memadai, maka orang tersebut akan kejebak dengan sendirinya dalam suatu pekerjaan informal maupun produktivitas yang gajinya rendah. Ketika kedua faktor tersebut digabungkan maka kesenjangan upah akan melebar. Tiga, meningkatnya akumulasi sumber daya keuangan di tangan segelintir anggota keluarga yang berkecukupan maka akan menyebabkan kesenjangan penghasilan yang lebih tinggi sekarang ini serta memperlebar kesenjangan sumber daya maupun modal terhadap penerus selanjutnya. Empat, tekanan yang terus-menerus dapat berpengaruh terhadap kesenjangan di titik apa saja dalam suatu kondisi kerja yang memiliki sistem mencari nafkah agar dapat hasilnya, menabung serta berinvestasi terutama pada kesehatan baik jasmani maupun rohani dan yang paling penting pendidikan.

Ketidacukupan Masyarakat

Masalah ketidakcukupan konsumsi pangan merupakan bagian dari masalah ketahanan pangan. Menurut Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian (2021), terdapat tiga aspek yang menjadi pilar ketahanan pangan di antaranya aspek keterjangkauan pangan, aspek ketersediaan pangan, dan aspek pemanfaatan pangan.

Dari ketiga aspek tersebut, terdapat dua aspek yang relevan terhadap pembahasan faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakcukupan konsumsi pangan yakni dari segi ketersediaan konsumsi. Selain itu, studi dari LIPI dan LPSK menyoroti pentingnya dukungan perlindungan sosial dari pemerintah selama masa pembatasan mobilitas (PSBB) di masa pandemi Covid-19 (Hidayati et al., 2020). Studi ini juga menunjukkan bahwa adanya dukungan perlindungan sosial dari pemerintah akan mendukung ketahanan pangan bagi kelompok rentan dan keluarga berpenghasilan rendah. Dengan demikian, aspek perlindungan sosial juga perlu menjadi aspek yang relevan terhadap pembahasan faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakcukupan konsumsi pangan.



Sumber: Supinah, 2020

Sementara itu, jika ditinjau berdasarkan level provinsi, meningkatnya ketidakcukupan konsumsi pangan (undernourishment) tercermin dari meningkatnya jumlah provinsi yang mengalami peningkatan status PoU ke level lebih tinggi. Terlihat dari gambar dari tahun 2019 hingga 2020, terdapat enam provinsi yang mengalami peningkatan tingkat prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (PoU), diantaranya Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Maluku, dan Papua Barat. Sementara itu, hanya ada satu provinsi yang mengalami penurunan tingkat prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (PoU), yaitu Papua.

Di sisi lain, pada tahun 2020, terlihat adanya indikasi kondisi PoU pada level provinsi yang mengelompok secara spasial. Secara umum, terlihat adanya kecenderungan untuk provinsi dengan tingkat PoU yang tinggi cenderung berdekatan dengan provinsi dengan tingkat PoU yang tinggi juga, begitu juga yang terjadi untuk provinsi dengan tingkat PoU sedang ataupun rendah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini, menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif sifatnya mendeskripsikan dengan menggunakan analisis. Metode kualitatif mengkaji lebih dalam terkait informasi yang akan dibahas yang dimana informasi yang didapat berasal dari artikel ilmiah, jurnal, dan karya ilmiah lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prevelensi ketidakcukupan masyarakat merupakan suatu kondisi dimana konsumsi kebutuhan makanan tidak terpenuhi sesuai dengan energi yang di butuhkan. Dalam kata lain, pemenuhan konsumsi untuk hidup sehat, normal, dan aktif tidak lagi terpenuhi dengan baik.

Berikut data BPS terkait prevelensi ketidakcukupan konsumsi pangan masyarakat Indonesia :

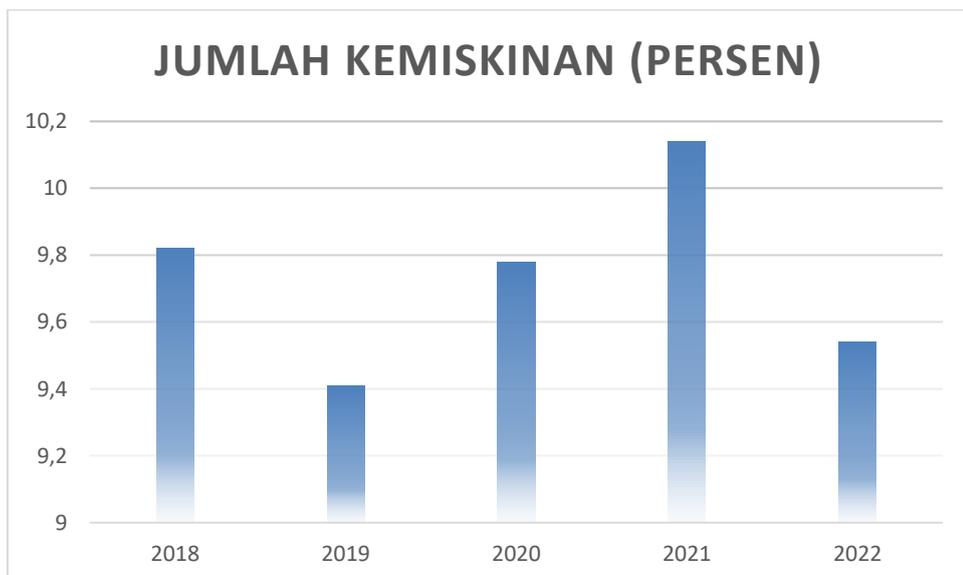


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Pada tahun 2017 pravelensi ketidakcukupan konsumsi pangan sebesar 8,23% dan pada tahun 2018 mengalami penurunan secara drastis menjadi 7,92% serta pada tahun 2019 juga kembali mengalami penurunan menjadi 7,63% sedangkan pada tahun 2020 pravelensi mengalami kenaikan menjadi 8,34% dan pada tahun 2021 juga mengalami kenaikan yang terbilang cukup drastis dari masa sebelumnya yaitu 8,49%.

Kemiskinan akan berdampak pada pemenuhan kebutuhan hidup manusia, dikarenakan kategori miskin yang menjadi penyebab seseorang kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya yang layak.

Berikut ini ditampilkan angka kemiskinan yang terjadi di Indonesia berdasarkan hasil data dari BPS :



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Pada tahun 2018 jumlah kemiskinan sebesar 9,82% dan pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 9,41% sedangkan pada tahun 2020 jumlah kemiskinan mengalami kenaikan kembali menjadi 9,78% dan pada tahun 2021 juga mengalami kenaikan yang sangat drastis sebesar 10,14% tetapi pada tahun 2022 jumlah kemiskinan kembali menurun menjadi 9,54%.

Kemiskinan di Indonesia sudah mulai menurun. Seharusnya konsumsi pangan masyarakat bisa terpenuhi dengan baik. Namun, nyatanya berdasarkan data konsumsi ketidakcukupan konsumsi pangan semakin naik. Hal ini dikarenakan adanya ketimpangan pengeluaran yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia.

Masyarakat dalam kategori miskin menjadi pemicu ketidakcukupan konsumsi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhannya. Hal ini dikarenakan tidak sebandingnya jumlah pendapatan dengan pengeluaran. Pendapatan yang sedikit dengan jumlah pengeluaran yang banyak menjadi pemicu terjadinya ketimpangan. Ketimpangan yang dimaksud adalah adanya perbedaan dengan tingkat pendapatan yang ada di berbagai wilayah di Indonesia.

Kemiskinan di Indonesia semakin mengalami penurunan. Namun, konsumsi pangan masyarakat belumlah menurun. Dari data kita simpulkan yang menjadi factor tidak terpenuhinya kebutuhan pangan dikarenakan kondisi kemiskinan. Kemiskinan yang menurun seharusnya bisa mengurangi jumlah ketidakcukupan konsumsi pangan yang ada di Indonesia. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat pergerakan gini ratio atau tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di provinsi berbeda-beda.

Ada provinsi-provinsi yang mengalami peningkatan gini ratio, ada juga yang turun. Ini terjadi karena perilaku dari masyarakat 40 persen lapisan ke bawah, 40 persen lapisan menengah, dan 20 persen lapisan atas itu berbeda-beda. komposisi dari pengeluaran masyarakat di masing-masing provinsi itu yang menyebabkan perbedaan. Berikut hasil data dari BPS terkait ketimpangan pengeluaran yang ada di Indonesia.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Pada tahun 2019 jumlah ketimpangan pengeluaran sebesar 0,380 dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 0,385, dan pada tahun 2021 juga mengalami kenaikan sebesar 0,401 serta pada tahun 2022 mengalami kenaikan kembali sebesar 0,403. Jadi intinya jumlah ketimpangan pengeluaran tiap tahun mengalami kenaikan.

Berdasarkan hasil data terlihat jelas bahwa Indonesia telah mengalami peningkatan ketimpangan pengeluaran. Tidak sebandingnya peningkatan dengan pengeluaran yang ada menjadikan masyarakat harus pandai dalam mengelola kebutuhan konsumsi hidupnya. Dalam kata lain adanya ketidakmampuan masyarakat hidup layak terjadi karna keterbatasan pendapatan.



Persebaran Gini Ratio Menurut Provinsi di Indonesia 2020

Berdasarkan pemaparan diatas dapat kita pahami kasus kemiskinan, ketimpangan harus di perhatikan lagi dikarenakan masih banyak masyarakat yang merasa kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Pengeluaran untuk kebutuhan hidup sehari-hari tidak sesuai dengan pendapatan yang diterima. Bahkan dalam pemenuhan pangan yang dikategorikan sebagai pemenuhan pokok masyarakat cenderung tidak cukup.

Jika ketidakcukupan masyarakat meningkat maka akibat yang timbul adalah terjadinya kelaparan yang berakibat pada gizi buruk, kebodohan semakin meningkat dikarenakan ketidakmampuan dalam menempuh Pendidikan, dan lain sebagainya.



Persebaran PDRB per kapita menurut Provinsi di Indonesia 2019

Penyebaran PDRB per kapita antar provinsi di atas tampak cukup menimpang. Dari peta tersebut tampak bahwasannya DKI Jakarta mempunyai PDRB per kapita yang lumayan meningkat dibandingkan provinsi lain yang ada di Indonesia, yaitu sekitar 269 juta rupiah. Kemudian setelah itu provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Riau, dan Papua Barat, kelima provinsi tersebut mempunyai PDRB per kapita antara 87,9 juta rupiah hingga 176 juta rupiah. Provinsi dengan PDRB per kapita paling rendah adalah Nusa Tenggara Timur dengan PDRB per kapita sebesar 19,591 juta rupiah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Ketidakcukupan konsumsi masyarakat terjadi dikarenakan adanya kemiskinan. Kemiskinan menjadi factor yang paling utama menjadi penyebab tidak terpenuhinya kebutuhan hidup secara layak. Baik dari segi makanan, tempat tinggal, Pendidikan dan juga kesehatan. Berdasarkan hasil data BPS angka ketidakcukupan konsumsi masyarakat Indonesia dari segi konsumsi pangan semakin meningkat dari tahun 2019 berkisar 7,63, tahun 2020 berkisar 8,43 sampai tahun 2021 berkisar mencapai 8,49 serta jumlah ketimpangan pengeluaran tiap tahun juga mengalami kenaikan drastis sehingga masyarakat harus pandai dalam mengelola kebutuhan konsumsi hidupnya.

DAFTAR PUSTAKA

- A Solana (2022). Analisis spasial faktor faktor yang mempengaruhi prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di Indonesia. *seminar nasional official statistics NZ*
- Riani (2011). Kecenderungan konsumsi marginal di kalangan masyarakat Indonesia. ejournal.unp.ac.id
- E Madirson (2020). Analisa faktor faktor yang mempengaruhi prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di Sumatera Barat dengan menggunakan metode GEODA. *jurnal riset gizi*

El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat

Vol 3 No 3 (2023) 760-769 P-ISSN 2746-9794 E-ISSN 2747-2736

DOI: 10.47467/elmujtama.v3i3.2934

K Kurniawan (2022). Kompleksitas permasalahan kemiskinan dan lingkaran konsumsi tembakau di Indonesia. *Sosio informa: kajian permasalahan sosial*

A Solana (2020). Analisis Spasial Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan di Indonesia Tahun 2020

Nuryulianingdyah (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia

Prevelensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Persen).
https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data/0000/data/1473/sdgs_2/1

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan Per Provinsi di Indonesia dalam Perspektif Islam. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie> Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(03), 2022, 3136-3144